

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian merupakan salah satu tonggak yang paling penting bagi suatu negara. Suatu negara harus memiliki perekonomian yang baik bagi terciptanya kesejahteraan rakyat. Perekonomian yang baik adalah perekonomian yang harus memiliki keselarasan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Karena apabila salah satu dari kedua aspek tersebut terjadi ketimpangan akan terjadi kejadian ekonomi yang negatif bagi suatu negara.

Di Indonesia untuk saat ini ekonomi makronya sudah memiliki dasar yang baik tetapi ekonomi mikronya cukup rentan, hal itu bisa mengakibatkan *bubble economics* atau gelembung ekonomi adalah perdagangan dalam volume besar dengan harga yang sangat berbeda dengan nilai intrinsiknya, dalam kata lain, memperdagangkan produk atau aset dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai fundamentalnya

Usaha kecil dan menengah (UKM) mempunyai peranan yang strategis dalam membangun ekonomi nasional yang mampu menyediakan alternatif kegiatan usaha dalam hal penyerapan tenaga kerja (Kristiyanti, 2012).

Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

sebanyak 56.534.592 unit atau 99,99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar. Data tersebut membuktikan, UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan, terutama bank untuk menyalurkan pembiayaan. Karena sekitar 60 - 70% pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan perbankan. Di Indonesia, peran industri kreatif dalam ekonomi Indonesia cukup signifikan dilihat dari besarnya jumlah pelaku usaha UKM dan kontribusi terhadap PDB tahun 2018 mencapai 60,34% dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen. (LPPI, 2018).

Bagi perkembangan ekonomi suatu negara, uang merupakan suatu kebutuhan. Bahkan bagi negara maju sekalipun, uang sangat berperan dalam perkembangan ekonomi negaranya. Hal ini disebabkan karena untuk menjalankan pembangunan, uang masih dianggap sektor yang paling vital menurut tinjauan ekonomi. Uang tersebut dapat digunakan untuk mendirikan usaha-usaha kecil dan digunakan untuk keperluan lainnya. Adapun salah satu cara untuk mendapatkan uang adalah melalui kredit (Rahmat, 2011)

Peranan lembaga keuangan dalam memajukan perekonomian suatu Negara sangatlah penting. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa dari perbankan, baik dari perorangan maupun lembaga, baik sosial maupun perusahaan. Sebagai suatu lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis, perbankan mempunyai kegiatan pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat luas,

kemudian dana yang berhasil dihimpun disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Lembaga keuangan yang memberikan kredit antara lain perbankan, Pegadaian, Koperasi Simpan Pinjam, Modal Ventura.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Makna dari kata kredit tersebut menunjukkan bahwa dasar dari pemberian kredit adalah berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan ini berarti bahwa seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di kemudian hari sanggup untuk memenuhi segala sesuatu yang telah menjadi perjanjian di antara kedua belah pihak.

Hasil Survei Perbankan juga mengindikasikan menguatnya optimisme terhadap meningkatnya penyaluran kredit pada tahun 2018. Untuk keseluruhan tahun 2018, pertumbuhan kredit mencapai 11,8% atau lebih tinggi dibandingkan 7,7% pada tahun 2017. (<https://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/>), sedangkan jumlah transaksi kredit oleh Perusahaan Pegadaian Pemerintah 18,383 miliar (<https://www.ojk.go.id>)

Salah satu Lembaga keuangan yang memberikan kredit adalah pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan yang lainnya. Secara operasional PT. Pegadaian

(Persero) merupakan Perusahaan milik Negara yang berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat dengan atas dasar hukum gadai. PT. Pegadaian (Persero) adalah Pegadaian konvensional dengan memungut biaya dalam bentuk bunga bersifat akumulatif dan berlipat ganda

Ada dua alasan seseorang memerlukan kredit, yaitu karena manusia adalah homo oeconomicus dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan sangat terbatas. Hal tersebut menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Maka dari itu, untuk meningkatkan usahanya, manusia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan yang disebut dengan kredit.

Dalam pemberian kredit diperlukan suatu sistem akuntansi. Sistem Akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang dipakai dalam mengelola data suatu usaha dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik berupa laporan-laporan keuangan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengevaluasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan adanya sistem akuntansi dapat mencegah adanya penyimpangan, kesalahan dan kecerobohan dalam melaksanakan pemberian pinjaman kredit. Selain itu sistem akuntansi digunakan untuk meningkatkan ketelitian dan menyajikan data akuntansi dengan akurat dan benar, sehingga pengendalian intern pegadaian dapat terlaksana dengan sangat baik

Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) oleh Wing Wahyu Winarno (2009) adalah Pengendalian intern meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan didalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi didalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Sistem pengendalian intern dapat dikatakan memadai jika dengan diterapkannya sistem tersebut, tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan sistem pengendalian intern dapat digolongkan menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administrasi. Tujuan sistem pengendalian intern adalah menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Ada beberapa komponen yang terdapat didalam sistem pengendalian intern adalah lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi serta pengawasan/ pemantauan.

Salah satu lembaga keuangan nonbank yang menyediakan fasilitas kredit dengan jaminan tertentu yaitu PT. Pegadaian (Persero). Perusahaan ini merupakan badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai seperti yang dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal

1150. Dalam pemberian kredit diperlukan suatu sistem akuntansi. Sistem Akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang dipakai dalam mengelola data suatu usaha dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik berupa laporan-laporan keuangan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengevaluasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan adanya sistem akuntansi dapat mencegah adanya penyimpangan, kesalahan dan kecerobohan dalam melaksanakan pemberian pinjaman kredit. Selain itu sistem akuntansi digunakan untuk meningkatkan ketelitian dan menyajikan data akuntansi dengan akurat dan benar, sehingga pengendalian intern pegadaian dapat terlaksana dengan sangat baik

Pengendalian intern pada PT. pegadaian (Persero) terdapat beberapa kelemahan, diantaranya adanya rangkap jabatan. Rangkap jabatan ini terjadi antara kasir yang merangkap sebagai bagian administrasi/ tata usaha yang seharusnya menurut Pedoman Operasional Kantor Cabang dilaksanakan oleh orang yang berbeda karena berbeda tugas. Hal demikian dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan, penyelewengan dan penyalahgunaan dana maupun aktiva perusahaan, sehingga dapat mengakibatkan ke kurang efektifan dalam pemberian kredit

Sistem pengendalian intern yang baik memungkinkan adanya internal check berupa otorisasi antara fungsi-fungsi yang berbeda dalam suatu transaksi, sehingga apabila ada kecurangan atau kesalahan dapat segera diketahui. Dokumen –dokumen, formulir pinjaman, kwitansi kas keluar

serta kas masuk belum benomor urut cetak, yang mengakibatkan kurangnya pengawasan intern terhadap transaksi yang bersangkutan. Dari fenomena pemberian kredit dan sistem akuntansi tersebut pegadaian dalam pengendalian kreditnya harus mampu mengevaluasi pengendalian intern dan berusaha sebaik mungkin untuk mengurangi resiko kredit.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Tbk Cabang Nganjuk”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Tbk Cabang Nganjuk ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Tbk Cabang Nganjuk

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a) Pengembangan ilmu akuntansi, diharapkan dapat dikembangkan lagi pada penelitian-penelitian berikutnya baik dalam unit yang sama atau berbeda.
- b) Bagi penulis, sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengendalian internal pemberian kredit
- c) Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam pengendalian internal pemberian kredit dan dapat mengembangkannya dalam hal pengendalian internal pemberian kredit ataupun faktor lain yang dapat dikaitkan dengan penelitian ini

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi manajemen, sebagai bahan masukan dalam mengefektifkan pemberian kredit dan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pengendalian internal
- b) Bagi PT. Pegadaian (Persero) Tbk lain sebagai bahan evaluasi terhadap pengendalian internal pemberian kredit